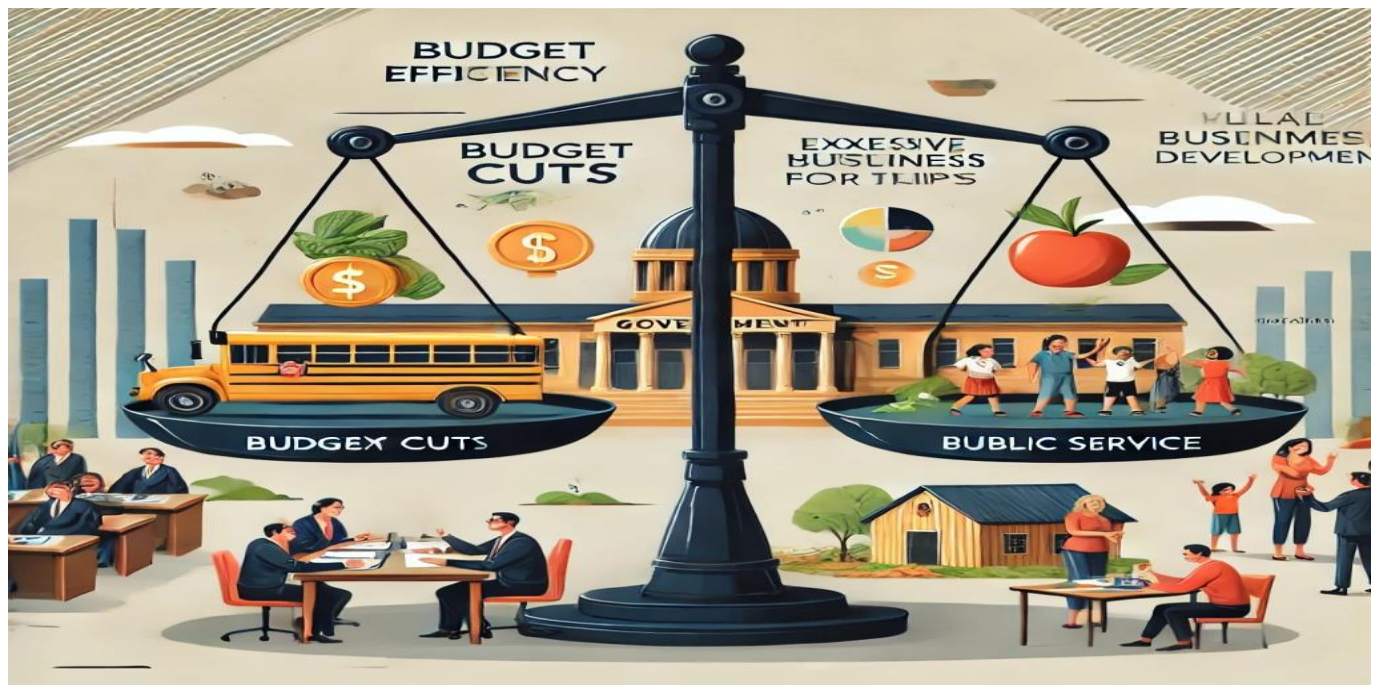


Efisiensi Anggaran, Dampaknya Terhadap Dana Desa



Pendahuluan

Efisiensi anggaran dalam pemerintahan merupakan strategi fundamental untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu area yang menjadi fokus efisiensi anggaran adalah pengeluaran perjalanan dinas oleh kementerian dan lembaga negara. Selain itu, efisiensi anggaran juga diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, seperti Dana Desa dan Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas

Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia berencana mengimplementasikan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun. Kebijakan ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Salah satu langkah utama dalam efisiensi ini adalah pemotongan anggaran perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, kegiatan rapat, seminar, dan seremonial.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyesuaikan belanja operasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa meskipun ada penyesuaian, program dan kegiatan strategis tetap berjalan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menginstruksikan pemotongan minimal 50% dari sisa alokasi pagu perjalanan dinas tahun anggaran 2024, kecuali bagi unit kerja yang tugasnya bergantung pada perjalanan dinas, seperti penyuluh pertanian dan penyuluh agama.

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Penyaluran Dana Desa

Efisiensi anggaran diharapkan dapat meningkatkan alokasi dana untuk program prioritas seperti Dana Desa. Dana Desa bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat

desa. Namun, efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa masih menjadi tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di desa, seperti tingkat pendidikan yang rendah, menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif.

Efisiensi dalam penggunaan Dana Desa juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran. Studi di beberapa desa menunjukkan bahwa efisiensi realisasi anggaran masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Dengan adanya penghematan belanja operasional di kementerian dan lembaga, diharapkan Dana Desa dapat lebih optimal digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa.

Efisiensi tersebut tidak berdampak langsung terhadap penyaluran Dana Desa, karena Dana Desa dialokasikan berdasarkan Alokasi Formula yang telah ditetapkan dalam APBMN dan akan ditransfer langsung ke Desa melalui APBD Kabupaten /Kota. Dana Desa dapat terdampak apabila efisiensi dilakukan dalam skala besar dan mempengaruhi belanja Negara secara keseluruhan, melalui revisi alokasi dalam APBN Perubahan (APBN-P), yang bisa berdampak pada jumlah Dana Desa yang diterima.

Dukungan Efisiensi Anggaran terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Salah satu program prioritas nasional yang mendapatkan dukungan dari efisiensi anggaran adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program ini dengan alokasi awal sebesar Rp71 triliun untuk menjangkau 15-17,5 juta penerima manfaat. Namun, dengan target perluasan hingga 82,9 juta penerima, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja operasional, termasuk perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, dan pengadaan peralatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa penghematan ini bertujuan untuk mengalokasikan dana bagi program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Efisiensi ini juga diharapkan memberikan efek berganda yang signifikan bagi usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.

Namun, perlu dipastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan dasar publik lainnya. Oleh karena itu, pemerintah akan selektif dalam melakukan pemotongan anggaran agar program-program penting tetap berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Kesimpulan

Efisiensi anggaran dalam pengurangan belanja operasional, termasuk perjalanan dinas, menjadi langkah strategis pemerintah untuk mendukung program prioritas nasional. Dengan adanya memangkas anggaran yang tidak esensial, dana dapat dialokasikan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa, yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas implementasi efisiensi ini bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.